



RENCANA KERJA (R E N J A)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2024

#KOLABORASI
MEDAN BERKAH



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,
Telepon/ Faksimile (061) 6611410,
Laman diskominfo.pemkomedan.go.id, Pos-el kominfo@pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

Nomor: 000.7.2-3/1925

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TAHUN 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012, Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5)
19. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
20. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan

- Gender (PUG) Kota Medan;
21. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan;
 22. Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2025.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan, segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan atau perbaikan kembali jika terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : M E D A N
Pada Tanggal : 8 Juli 2024

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



**ARRAHMAAN PANE, S.STP., M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780730 199612 1 001**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 telah selesai disusun.

Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan ini berisi tentang rencana kerja dan anggaran tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Medan. Rancangan Renja ini diharapkan dapat memberikan informasi atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang terukur dan sekaligus sebagai arahan pokok dan acuan kinerja dalam melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan pada tahun 2025.

Dengan mengacu pada evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan APBD Tahun 2024 diharapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025.

Medan, Agustus 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN



ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780730 199612 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 . Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.3. Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	44
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	59
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	61
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.	62
3.3. Program dan Kegiatan	64
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	73
BAB. V PENUTUP	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen perangkat Daerah, renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Selain itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Medan Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau

baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Walikota yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 5 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Surat Edaran Menteri Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE 46/MPPPA/11/2012, Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarustamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
 22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
 23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;

24. Peraturan Walikota Medan No. 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 adalah:

- Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun Anggaran 2025.
- Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2025.
- Menjadi landasan bagi penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 disusun berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sampai dengan Tahun 2023 diperlukan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2025. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kota Medan terus mengalami peningkatan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Program dan Kegiatan ditampung oleh lima bidang, dan satu

sekretariat. Kegiatan-kegiatan dalam tahun 2023 terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan sebagai berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
- 3. Program Aplikasi Informatika
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

- 3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 3.2. Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 3.2.4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
 - 4.1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
 - 4.1.4. Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
 - 4.1.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023 adapun Pagu Anggaran yang ditetapkan untuk biaya program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebesar Rp. 59.479.600.603,-. Pagu ini digunakan sebagai biaya program, kegiatan dan sub kegiatan ini terdiri atas belanja operasi dan belanja modal di dinas. Rincian Belanja Operasi berjumlah Rp. 56.224.427.593,- merupakan hasil penjumlahan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 47.354.011.228,- dan Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.870.416.365,-. Sedangkan rincian Belanja Modal berjumlah Rp. 3.255.173.010,- merupakan hasil penjumlahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 2.166.620.885,- dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 1.088.552.125,-

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam mencapai target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun 2023 serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan
Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan s/d Tahun 2023

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01				Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	98.24%	100%	98.24%	98.24%	100.00%	2	33.05
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	6	100.00%	1	1	100.00%	1	2	19.45
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	100.00%	1	1	100.00%	1	2	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	2	33.34
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	100.00%	50	47	94.00%	55	66	16.93

RENCANA KERJA TAHUN 2025

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2024	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	2	33.34
			02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7	0	1	1	1	2	2	19.05
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100%	95.14%	100%	95.14%	95.14%	100.00%	2	32.53
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	97.44%	1	1	100.00%	1	2	19.45
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6	100%	1	1	100.00%	1	2	19.45
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10	100.00%	3	3	100.00%	3	5	18.34
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	100.00%	1	1	100.00%	1	2	19.45
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20	73.39%	4	4	100.00%	4	6	17.50
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10	0.00%	0	0	#DIV/0!	1	0	#DIV/0!
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35	100.00%	4	4	100.00%	6	7	17.15
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	2	33.34

RENCANA KERJA TAHUN 2025

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	265	0.00%	108	102	94.44%	165	157	16.73
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	169	100.00%	56	56	100.00%	84	85	16.77
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	2	33.34
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	18	100.00%	3	3	100.00%	3	5	17.60
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6	95.29%	1	1	100.00%	1	2	19.45
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	100%	100.00%	2	2	100.00%	100.00%	3	33.34
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	54	100.00%	8	8	100.00%	10	12	16.98
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	85	93.33%	13	12	92.31%	14	18	16.85
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100%	100.00%	94%	94.00%	100.00%	93.00%	2	33.34

RENCANA KERJA TAHUN 2025

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2024	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	100%	100.00%	94%	94.00%	100.00%	93.00%	2	33.34
				05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	35	100.00%	4	4	100.00%	4	6	17.15
				06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	6	50.48%	1	1	100.00%	1	2	19.45
				10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	735	100.00%	50	49	98.00%	50	67	16.69
				12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	16	100.00%	3	3	100.00%	3	5	17.71
				13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	25	100.00%	4	4	100.00%	4	6	17.34
2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	2	33.34
2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggaraan sesuai PM Kominfo no. 5/2015	100%	200.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	3	33.34

RENCANA KERJA TAHUN 2025

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1	0.00%	0	0	#DIV/0!	1	0	#DIV/0!
				02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi pengaturan domain dan sub domain pemerintah kota	4	100.00%	0	0	#DIV/0!	0	1	#DIV/0!
				03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	1045	100.00%	232	232	100.00%	232	310	16.69
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	100.00%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	2	#DIV/0!
				02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	0.00%	1	1	100.00%	1	1	33.34
				03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1	100.00%	1	1	100.00%	1	2	33.34
				04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	4	100.00%	3	3	100.00%	3	5	20.84
				07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintaan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	100.00%	1	1	100.00%	1	2	33.34
				08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	15	0.00%	0	0	#DIV/0!	5	2	#DIV/0!

RENCANA KERJA TAHUN 2025

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3	0.00%	0	0	#DIV/0!	1	0	#DIV/0!
				10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3	0.00%	0	0	#DIV/0!	1	0	#DIV/0!
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai	100%	88.89%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	2	33.34
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	100%	88.89%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	2	33.34
				01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pebgumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8	100.00%	1	1	100.00%	1	2	18.75
				03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	8	66.67%	1	1	100.00%	1	2	18.75
				04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	506	100.00%	75	75	100.00%	75	101	16.70
				05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	32	0.00%	5	5	100.00%	75	30	17.19
				06	Penyeleggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	4	0.00%	1	1	100.00%	1	1	20.84
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terjaga dan terlindungi dengan baik	100%	100.00%	66%	66.00%	100.00%	55%	2	33.34

RENCANA KERJA TAHUN 2025

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kominfo) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Tahun 2024	
								Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	100%	100.00%	66%	66.00%	100.00%	80.00%	33.34
				02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pegelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	2	1	1	100.00%	1	20.00
				04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	50	33	56	56	100.00%	56	17.00
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menggunakan perangkat komunikasi sandi	27	27	27	27	100.00%	27	17.29
				01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27	27	27	27	100.00%	27	17.29

Dari Tabel diatas dapat dilihat hal hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mempunyai 3 urusan**, yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dengan realisasi capaian program kegiatan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Urusan Komunikasi dan Informatika melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,24%, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 100%, dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 100%.
 - b. Urusan Statistik melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 100%.
 - c. Urusan Persandian melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 100%.
- 2. Realisasi program/kegiatan/sub Kegiatan yang tidak memenuhi target** Untuk realisasi kinerja pada umumnya program/kegiatan/sub kegiatan tidak ada yang tidak memenuhi target. Semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dengan rata rata diatas 80%.
- 3. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran** yang direncanakan sebagai berikut :
 - a. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan diantara 90% s.d 100% (memuaskan s.d sangat baik) pada Tahun 2023. Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai indikator program yaitu terwujudnya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang tersedia . Program ini terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan dan 15 (lima belas) sub kegiatan.

 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan indikator jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia, capaian pelaksanaan 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, capaian pelaksanaan 94% dari target 50 orang yang terealisasi untuk 47 orang.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan dengan indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, capaian pelaksanaan 100%.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan dengan kriteria pelaksanaan memuaskan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dengan indikator Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan, capaian pelaksanaan 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan, capaian pelaksanaan 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan, capaian pelaksanaan 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan, capaian pelaksanaan 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan, capaian pelaksanaan 100%.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, capaian pelaksanaan sebesar 100%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator jumlah paket mebel yang disediakan, capaian pelaksanaan 99,44%.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan, capaian pelaksanaan 100%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan, capaian pelaksanaan 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan, capaian pelaksanaan 100%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, capaian pelaksanaan 100%.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang

dipelihara, capaian pelaksanaan 92,31%.

b. Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Program Informasi dan Komunikasi publik dengan realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan diantara 98% s.d 100% (sangat baik) pada Tahun 2023. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (lima) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan indikator Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik, pencapaian pelaksanaan sub kegiatan ini 100%.
- Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan indikator Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik, pencapaian pelaksanaan sub kegiatan ini 100%.
- Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dengan indikator Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya, pencapaian pelaksanaan sub kegiatan ini 98%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas dengan indikator Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan, pencapaian pelaksanaan sub kegiatan ini 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota, pencapaian pelaksanaan sub kegiatan ini 100%.

Kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan

mencapai indikator program yaitu terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

c. Program Aplikasi Informatika

Pada program aplikasi informatika terdapat 2 (dua) jenis kegiatan yang dilakukan :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang dilakukan yaitu : Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini, ada 4 (empat) sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yaitu :
 - Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, pencapaian pelaksanaan 100%.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola, dengan pencapaian pelaksanaan 100%
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Jumlah aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan sebesar 100% (sangat baik). Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 (lima) sub kegiatan yang dilaksanakan secara memuaskan yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.
- Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.
- Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dengan indikator Jumlah Infrastruktur Statistik, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah dengan indikator Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.

e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Persandian.

Program Penyelenggaraan Persandian dengan realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan 100% (sangat Baik). Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan dengan kriteria sangat baik yang dilaksanakan yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.

b. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah, dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi, dengan pencapaian pelaksanaan 100%.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, bahwasanya dapat mendorong capaian kinerja Pemerintah Kota Medan yaitu dapat meningkatkan layanan publik secara online dan terintegrasi, tersedianya data statistik daerah yang terkelola dengan baik serta terlindunginya layanan informasi pemerintah Kota Medan.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengusulkan anggaran yang lebih besar terutama untuk program Pengelolaan Aplikasi Informatika .

Dimana masih banyaknya aplikasi di Pemerintah Kota Medan yang belum terintegrasi, sehingga masih kurang dalam menangani pelayanan kepada masyarakat. Dan juga perlunya penyediaan penambahan kapasitas bandwidth internet di Pemerintah Kota Medan demi kelancaran tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlunya adanya tambahan untuk melaksanakan sosialisasi terkait Satu Data Kota Medan, sehingga data yang diperlukan dapat lebih baik dan valid. Pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Persandian, perlu dilakukan tata kelola keamanan yang baik, dimana perlu dibentuknya CSIRT (Cyber Security Incident Responce Team) demi keamanan layanan informasi pemerintah daerah.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan pada penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2023 dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2023 sebesar 100% yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran. Sasaran dinyatakan “sangat berhasil” jika capaiannya $\geq 85\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Target pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk Tahun 2023 telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (PK) Tahun 2023. Sasaran Strategis yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi.

2. Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan dan system pemerintah berbasis elektronik yang memadai.
3. Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik.

Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	1. Indeks Transformasi Data Digital 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	0,93 Informatif
2.	Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	1. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2. Indeks SPBE	100% 2.76
3.	Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik	68%

Adapun indikator kinerja renstra yang dicapai pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Indeks Transformasi Data Digital dengan target 0,93**, target ini tercapai yang mana jumlah data digitalisasi yang diperoleh Tahun 2023 target data yang berpotensi terdigitalisasi pada OPD berkurang menjadi 480 (data statistik sebanyak 405 dan data geospasial sebanyak 75). Ini menjadi angka target baru setelah pemerintah Kota Medan Melakukan Penggabungan dan Perubahan Nama-nama OPD. Perubahan

Nomenklatur ini diperkirakan mempengaruhi jumlah data sektoral yang berkualitas dan layak dibagi pakaikan. Maksud Jumlah data terdigitalisasi merupakan data yang sudah dapat dapat disimpan kedalam computer ataupun google drive yang bisa berbagi pakai, data yang dimaksud berupa data statistik sektoral dan data geospasial.

Indeks Transformasi Data Digital (0,93)

$$= \frac{\text{Jumlah Data Digitalisasi}}{\text{Jumlah Data yang Berpotensi Terdigitalisasi OPD}} = \frac{446}{480}$$

2. **Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan target informatif**, target ini tercapai yang mana target ini diberikan oleh Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Utara selaku lembaga mandiri yang melakukan penilaian keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya. Pada Tahun 2023 kategori kualifikasi badan publik yang diterima oleh Pemerintah Kota Medan adalah **Informatif**.

3. **Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 100%**, target ini tercapai yang mana pada Tahun 2023 semua jumlah layanan publik yang tersedia dapat terintergrasi secara online atau system aplikasi dapat saling berhubungan dalam data atau informasi secara online. Layanan publik yang terintegrasi secara online adalah semua sistem/aplikasi yang dapat saling berhubungan dalam data atau informasi secara online untuk mendukung Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), guna meningkatkan efisiensi pengelolaan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan SPBE.

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (100%)

$$= \frac{\text{Jumlah Layanan Publik Yg diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik yang Tersedia}} \times 100\% = \frac{26}{26} \times 100\%$$

4. **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Target Nilai 2,76**, target ini tercapai dimana nilai 2,76 atau kategori baik merupakan hasil pengukuran tingkat kematangan penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemerintahan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Indeks SPBE merupakan hasil pengukuran tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Instrument pengukuran ini diuraikan lebih terperinci pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. **Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan baik dengan target 68%**, target ini tercapai dimana jumlah layanan informasi yang terlindungi dan terjaga dengan baik sebanyak 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 50 jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan informasi. Jumlah layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik berupa layanan keamanan sterilisasi ruangan, penetrasi test terhadap website/aplikasi serta pelayanan tanda tangan digital
 Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik (68%)

$$= \frac{\text{Jumlah Layanan Informasi yg Terlindungi dan Terjaga dengan Baik}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Informasi}} \times 100\% = \frac{34}{50} \times 100\%$$

Untuk Tahun 2024 target kinerja yang akan dicapai dinas sesuai dengan perjanjian kinerja kepala dinas yang ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yaitu Indeks SPBE, Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Transformasi Data Digital, Nilai Keterbukaan Informasi Publik dan Nilai Sakip Perangkat Daerah. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang akan dicapai Tahun 2024 dapat dilihat pada Table 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Indeks SPBE 2. Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,85 69,57%
2.	Meningkatnya Kualitas Data Daerah	1. Indeks Transformasi Data Digital 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	0,94 Informatif
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71)

Keterangan :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan nilai 2,85, ditetapkan sesuai dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, terkait Target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025.
2. Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan berbasis yaitu jumlah layanan publik/pemerintahan yang sudah dapat diakses secara elektronik dan merupakan layanan SPBE yang terdapat dalam Arsitektur Domain Proses Bisnis SPBE Kota Medan, dan ini sebagai indikator baru pada Renstra Perubahan Dinas.

3. Indeks Transformasi Data Digital dengan Nilai 0,94. Data yang dimaksud adalah data-data sektoral yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang dikumpulkan dalam portal resmi milik Pemerintah Kota Medan, dan nilai ini sebagai indikator baru pada Renstra Perubahan Dinas.
4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik yaitu Penilaian Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Utara. Nilai ini ditetapkan berdasarkan Baseline 2023 dimana dinas mendapat Penilaian Informatif dari Komisi Informasi Publik (bersifat mempertahankan)
5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dengan Nilai BB (71) sesuai dengan Baseline Tahun 2023. Nilai SAKIP ini diperoleh dari ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun sesuai dan tepat waktu.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan diberi Pagu Anggaran pelaksanaan program sejumlah **Rp. 64.949.052.387,-** yang terdiri atas pelaksanaan 5 (lima) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Rp. 29.582.290.443,-
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp. 519.679.000,-
3. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp. 957.272.600,-
4. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 16.078.806.870,-
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 17.811.003.484,-

Pelaksanaan program diatas ditujukan untuk pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024. Adapun penggunaan pelaksanaan program dalam pencapaian sasaran strategis dinas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik pencapaiannya di dukung melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Data Daerah pencapaiannya di dukung melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pencapaiannya di dukung melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun persente kinerja pelaksanaan program yang sudah dilakukan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 di dinas adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 50%.
- b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 50%.
- c. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 27%.
- d. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 50%.
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 50%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, dan IKU (Indikator Kinerja Utama), sesuai dengan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada

uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Pencapaian tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mulai Tahun 2021 s.d 2024, ada 8 (delapan) capaian atau akan dicapai indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Transformasi Data Digital;

Indeks Transformasi Data Digital ini merupakan hasil perhitungan pencarian persentase keberhasilan perolehan data. Adapun hasil ini merupakan hasil perhitungan yang berasal dari komponen data statistik. Pencapaian Dinas sampai Tahun 2023 adalah 0,93, dan diharapkan untuk Tahun 2024 nilai ini mengalami peningkatan menjadi 0,94.

2. Tercapainya Nilai Keterbukaan Informasi Publik;

Keterbukaan Informasi Publik merupakan kewajiban pemerintah yang harus dilakukan untuk memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Pencapaian Dinas Tahun 2023 adalah informatif, dan untuk Tahun 2024 diharapkan penilaian ini masih tetap kategori informatif. Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Republik Indonesia.

3. Tersedianya Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;

Tersedianya layanan publik yang dapat berbagi pakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan dan masyarakat. Untuk penilaian terhadap Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di targetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% juga, dimana sudah tersedia layanan publik yang terselenggara secara online dan terintegrasi pada Pemerintah Kota Medan. Layanan

Publik yang terintegrasi berupa Aplikasi SIMP4AD, SIMPEG, SIAK, SARANA, SABER PUNGLI, JDIH, getbphtbservice, getpbbservice dan Lapor.go.id Data Layanan Publik Diharapkan dengan adanya aplikasi yang baik, dapat membantu meningkatkan pelayanan informasi di Pemerintahan Kota Medan untuk masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan informasi dalam rangka penerapan e-government. Aplikasi layanan publik yang terintegrasi antar SKPD Pemerintah Kota Medan dan instansi diluar Pemerintah Kota Medan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini:

TABEL 2.1. LAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI/DATA INTEGRASI ANTAR SKPD

No	SKPD	SKPD TERINTEGRASI	NAMA APLIKASI	KETERANGAN
1	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RERTIBUSI DAERAH	BPKAD	SIMP4AD	Untuk Sistem Flaging Pembayaran
2	BKDPSDM	DINAS KOMINFO	SIMPEG	Integrasi data SIMPEG dengan Aplikasi e-office/SARANA, Aplikasi ASN Kota Medan dan Aplikasi Command Center
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SIBISA	Integrasi data SIAK dengan Aplikasi SIAP Pemko Medan
4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	BKDPSDM	SARANA	Integrasi data Kepegawaian Kota Medan dengan Aplikasi SARANA Kota Medan
5	INSPEKTORAT KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SABER PUNGLI	Integrasi data administrasi kependudukan dengan Aplikasi Saber Pungli Kota Medan

6	BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MEDAN	SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN	JDIH	Integrasi data Peraturan dan Perundang undangan Kota Medan dengan Aplikasi Bagian Hukum Setda Kota Medan
7	DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	SIDUTA	Aplikasi Pencarian Lowongan Kerja Berdasarkan NIK
8	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BADAN PENGELOLAAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	SIPANDU	Aplikasi Perizinan Terpadu secara Online

TABEL 2.2. DATA INTEGRASI DILUAR PEMKO MEDAN

No	SKPD	INSTANSI TERINTEGRASI	NAMA APLIKASI	KETERANGAN
1	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RERTIBUSI DAERAH	BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)	getbphtbservice	Inquery data pembayaran dan BPHTB dari BPN ke Pemko Medan
2	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RERTIBUSI DAERAH	BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)	getpbbservice	Inquery data pembayaran PBB dari BPN ke Pemko Medan
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN	Kementerian PAN RB	Lapor.go.id	Lapor.go.id terintegrasi melalui API dengan Aplikasi Medan Rumah Kita
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA MEDAN	Kementerian ATR-BPN	https://patrolta.ru.pemkomedan.go.id	Layanan Pengaduan Masyarakat untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator ini menunjukkan adanya layanan publik yang dapat berbagi pakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan

pelayanan pada Pemerintah Kota Medan dan masyarakat. Layanan publik yg terintegrasi secara online adalah semua layanan aplikasi yg dikembangkan oleh Pemko Medan untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE. Ada 4 (empat) Domain Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu :

1. Domain Kebijakan Internal SPBE yaitu pengaturan mengenai pembangunan aplikasi SPBE di Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
2. Domain Tata Kelola SPBE yaitu kerangka kerja yang memastikan terlaksananya peraturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Domain Manajemen SPBE yaitu pendekatan sistematis yang meliputi proses,
4. Domain Layanan SPBE yaitu jenis pelayanan yang diberikan meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengawasan internal pemerintah.

Pencapaian Dinas Tahun 2023 untuk nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah 2,76, dan untuk Tahun 2024 diharapkan adanya peningkatan menjadi 2,85. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

5. Peningkatan Cakupan Data Statistik Daerah yang tersedia dan terkelola dengan baik secara integrasi;

Cakupan ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketersediaan data sektoral dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan terpenuhinya isian data yang diharapkan. Data tersebut berasal dari OPD-OPD yang terkait langsung dalam pengisian data untuk mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Kota Medan. Data sektoral yang disediakan adalah data yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi setiap OPD.

6. Tersedianya Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik;

Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik, jumlah target yang ditetapkan 100%, namun realisasi yang dicapai sebesar 48%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya jumlah kasus yang ditangani seperti pelaksanaan penetrasi tes, sterilisasi ruangan dan permintaan Tanda Tangan Elektronik dari 56 jumlah OPD yang ditargetkan melaksanakan prosedur pengaman. Sehingga realisasi tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Adapun cakupan layanan informasi yang terlindungi sebanyak 27 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Sterilisasi ruang kerja Walikota Medan (Maret)
2. Sterilisasi ruang kerja Wakil Walikota Medan (Maret)
3. Sterilisasi ruang kerja Kaban BKD Medan
4. Sterilisasi ruang kerja Kadis Pendidikan Medan
5. Sterilisasi ruang kerja Walikota Medan (Juli)
6. Sterilisasi ruang kerja Wakil Walikota Medan (Juli)
7. Sterilisasi ruang kerja Kabag ULP Medan
8. Website aduanbansos.pemkomedan.go.id
9. Website sarana.pemkomedan.go.id
10. Website jad-wal.pemkomedan.go.id
11. Website monitoring.pemkomedan.go.id

12. Website kelampas.pemkomedan.go.id
13. Website logistik.pemkomedan.go.id
14. Website kelbantantimur.pemkomedan.go.id
15. Website perkimtaru-arsip.pemkomedan.go.id
16. Website elearning.pemkomedan.go.id
17. Website 103.116.168.80
18. Website datapasien covid19kotamedan.pemkomedan.go.id
19. Website covid19.pemkomedan.go.id

Permintaan Tanda Tangan Elektronik, sebagai berikut :

20. Sekretaris Daerah Kota Medan
21. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
22. Asisten Pemerintahan dan Sosial
23. Kepala Badan BKDPSDM Kota Medan
24. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
25. Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan
26. Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
27. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

7. Terjalannya kerjasama dengan sejumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik.

Kerjasama ini bertujuan sebagai media yang dipakai Pemerintah Kota Medan dalam penyampaian rencana, pelaksanaan, hasil dan sarung/kritik dari masyarakat. Sehingga antara pemerintah dan masyarakat terjalin komunikasi yang baik dalam pelaksanaan pembangunan. Sejak Tahun 2023 atau dalam Perubahan Renstra Dinas, Indikator ini tidak lagi menjadi Perjanjian Kinerja Dinas.

8. Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) merupakan sebuah sistem yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan daerah, sistem penganggaran daerah dan sistem pelaporan kinerja daerah yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan daerah. Tujuan penilaian ini adalah untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam menggunakan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk Tahun 2023, penilaian SAKIP belum dimasukkan sebagai sasaran strategis dinas yang dicapai melalui perjanjian kinerja kepala dinas, akan tetapi untuk Tahun 2024 penilaian SAKIP ini telah dimasukkan dalam perjanjian kinerja kepala dinas sebagai sasaran strategis yang akan dicapai. Untuk tahun 2024 indikator Nilai SAKIP dinas ditetapkan yaitu **71 (BB) “Sangat Baik”**

Keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja atau pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sampai pelaksanaan 2023 dapat dilihat pada Tabel T.C.30 berikut ini :

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Tabel T-C.30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks Transformasi Data Digital				0,91	0,92	0,92	0,93	0.80	0.92	0.93	0.94	
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik				-	-	informatif	informatif	-	-	informatif	informatif	
3.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks SPBE				-	-	2,76	2.85	-	-	2,76	2,85	
5.	Persentase peningkatan cakupan data statistik daerah yang tersedia dan terkelola dengan baik secara integrasi				100.	100.	-	-	100.	100	-	-	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi	
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik				42	55	68	-	48	55	68	-	
7.	Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik yang tersedia				185	259	-	-	158	259	-	-	
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	-	-	BB (71)	-	-	-	BB (71)	

Untuk Tahun 2023, dikarenakan adanya Renstra Perubahan Dinas, maka indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, juga mengalami perubahan, dimana sebagian indikator kinerja yang diganti/direvisi.

Pada Tahun 2023 indikator kinerja yang ditetapkan adalah Indeks Transformasi Data Digital, Nilai Keterbukaan Informasi Publik, Persentase Layanan Publik yang Dislenggarakan secara Online dan terintegrasi, Indeks SPBE dan Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang urusan Komunikasi dan informatika, terdapat faktor faktor yang mempengaruhi pelayanan (kekuatan dan kelemahan) sebagai permasalahan dan hambatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi, hal tersebut merupakan indikator sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

• Permasalahan dan Hambatan

1. Belum memadainya kapasitas sejumlah pegawai dalam menangani pekerjaan dalam bidang aplikasi teknologi informasi dan konten informasi dilingkungan Kota Medan
2. Belum tersedianya jaringan intranet Kota Medan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyampaian informasi dan mengurangi kesenjangan pemerolehan informasi di antara penduduk Kota
3. Masih terpisahnya lokasi Pusat Data Pemerintah Kota dengan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota yang dapat mengurangi tingkat efisiensi dalam manajemen dan operasional.

4. Belum terkelolanya sumber informasi secara sinergis, baik internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada OPD di lingkup Pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu, masih terdapat kendala dalam pengumpulan data informasi yang akurat, realibel, lengkap dan benar.
5. Subtansi berita/ informasi yang disampaikan masih terdapat kekurang sinkronan dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna antar OPD.
6. Belum optimalnya pemanfaatan TIK untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, baik dan bersih.
7. Kurangnya penguatan kemampuan pada pengelola dan pengguna teknologi informatika.

- **Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional**

Untuk skala nasional sesuai instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *E-Government* secara nasional. Mengadopsi instruksi ini Pemerintah Kota Medan dalam hal ini diwakili Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus berupaya melakukan pengembangan *E-Government*, agar pelayanan yang diberikan menjadi pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*E-Government*) agar pelaksanaan pelayanan terutama pelayanan publik dan pelayanan antar instansi (layanan dengan aplikasi terintegrasi) dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Sesuai program pemerintah tersebut, Pemerintah Kota Medan juga menuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Medan 2021 – 2026, Pemerintah Kota Medan dengan Visi Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif. Berdasarkan visi tersebut maka ditetapkan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Medan yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mencapai strategis tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang orientasi tugas dan fungsinya untuk melakukan/memberikan pelayanan publik, maka ditetapkanlah sasaran dinas yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan inovasi dan pengembangan penggunaan aplikasi layanan agar layanan pemerintahan yang diberikan dapat berjalan dengan baik, cepat dan akurat sesuai tuntutan era digitalisasi, baik dalam hal penyediaan layanan aplikasi pemerintahan, layanan penyediaan data akurat, layanan penyampaian komunikasi publik dan layanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di dinas.

• **Tantangan dan Peluang**

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikut :

1. Tantangan atau upaya peningkatan kemampuan untuk mengatasi kesulitan atau masalah yang muncul.
 - a. Informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh karenanya informasi harus dapat diperoleh secara cepat, tepat waktu, biaya yang ringan dan diperoleh dengan cara yang mudah.
 - b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat.

- c. Informasi publik belum dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang baik.
 - e. Perlunya peningkatan dalam pengamanan informasi agar teknologi informasi dapat digunakan secara baik dan aman bagi penggunaannya.
2. Peluang dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi yang memberikan kesempatan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau menguntungkan
- a. Adanya dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan teknologi informasi, komunikasi, pengamanan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara terus dan berkelanjutan.
 - b. Tersedianya beraneka ragam media komunikasi dan informasi publik yang dapat digunakan dan menyentuh lapisan masyarakat yang lebih banyak dan beraneka ragam.
 - c. Dibutuhkannya peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat yang semakin hari semakin dibutuhkan dan diminati dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik.
 - d. Pengembangan teknologi informasi dalam hal penggunaan internet yang terus berkembang dikalangan masyarakat semakin diminati.
 - e. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan semakin membutuhkan pengembangan *E-Government* sesuai perkembangan jaman era digitalisasi.

• Isu Strategis dan Rekomendasi

Beberapa isu strategis yang muncul antara lain :

1. Penyebarluasan informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan dan dapat disebarluaskan secara cepat melalui berbagai media informasi dan komunikasi publik.
2. Perlunya upaya untuk penyediaan informasi publik melalui pengelolaan dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), demi menjaga konsistensi dan komitmen dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.
3. Kemampuan mengintegrasikan aplikasi layanan publik harus ditingkatkan.
4. Kebutuhan pelayanan yang cepat, akurat dan dengan biaya yang rendah dalam pelayanan publik dibutuhkan dalam layanan penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun rekomendasi yang diberikan untuk menanggapi isu-isu strategis yang muncul dikalangan masyarakat adalah sebagai berikut ini :

1. Aktif menggunakan berbagai media yang ada seperti media elektronik, media sosial, media cetak dan media luar ruang, agar penyampaian berbagai informasi yang dikomunikasikan ke publik/masyarakat dapat dengan cepat. Sehingga segala hal yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dapat dirasakan dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, dan sebaliknya pemerintah juga dapat dengan segera mengetahui permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pembenahan.
2. Mengaktifkan peran dinas sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang mana selain menginformasikan pelaksanaan pembangunan dan juga sebagai sumber penyediaan data, informasi dan dokumentasi, dan juga sebagai media untuk menerima dan penanggapi masukan baik saran, kritik dan

memberi jawaban terhadap gejala yang mungkin muncul dimasyarakat untuk dengan segera dilakukan perbaikan.

3. Segera membuat aplikasi layanan publik yang terintegrasi, sehingga layanan yang dibutuhkan dapat dengan cepat melayani kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik dengan berbagai organisasi perangkat daerah yang menyediakan layanan tersebut.
4. Di era globalisasi dengan penggunaan jaringan internet yang semakin modern, masyarakat membutuhkan peningkatan pemberian layanan publik dengan cepat, akurat dan dengan biaya yang relatif lebih murah, sehingga dengan biaya yang terjangkau masyarakat dapat melakukan sendiri kebutuhan layanan publik yang dibutuhkannya tanpa adanya peran perantara lain yang dapat menyebabkan penyediaan layanan jadi membutuhkan biaya yang lebih tinggi.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Rencana awal RKPD tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-PD) Tahun 2025. Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai kerangka awal dalam mengajukan Usulan Musrenbang Tahun Anggaran 2025. Setelah Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka setiap OPD wajib menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian, mempunyai kewajiban mendukung kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah khususnya misi Medan Bersih yaitu Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel, serta mendukung tercapainya sasaran

Daerah yaitu : Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi” dengan indikator Indeks Transformasi Data Digital.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana kerja. Bagian ini berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Reviu ini dilakukan melalui proses pengamatan dan diskusi dengan pejabat terkait agar Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan perkembangan yang ada serta menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mungkin muncul di saat tertentu. Adapun tahapan pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah di dinas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berisikan para pejabat eselon yang melakukan evaluasi pelaksanaan.
2. Melakukan Evaluasi dan Penelaan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ada agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah pusat.
3. Penyusunan agenda kerja tim reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi rapat/pertemuan untuk menyatukan masukan-masukan yang ada dalam pengambilan kesimpulan yang terbaik.
4. Menyiapkan data dan informasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan hasil evaluasi/penelaan yang telah dilakukan sebelumnya untuk pengambilan kesimpulan dan rekomendasi.

Proses ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap rumusan program dan kegiatan yang sesuai dengan rancangan awal OPD dengan perkembangan kebutuhan yang ada di masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat yang mungkin muncul dan disesuaikan dengan keuangan pemerintah daerah termasuk dalam hal penganggaran. Untuk Tahun Anggaran 2023 rumusan program dan kegiatan yang berbeda dengan ranwal yaitu pada sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan jumlah mesin dari 15 menjadi 14 unit dengan pagu

anggaran yang sama. Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) disajikan pada table T-C.31 berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Urusan: Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Bidang Urusan: Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan: Statistik

Bidang Urusan: Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
I	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	Rp 19,196,426,099	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	Rp 22,951,977,098	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Rp 248,734,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Rp 127,607,000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	Rp 248,734,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	Rp 127,607,000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Rp 10,658,996,515	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	Rp 15,662,822,194	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	Rp 10,658,996,515	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	Rp 15,662,822,194	-
	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawalan daerah	100%	Rp 255,341,250	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawalan daerah	100%	Rp 235,427,500	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	Rp 205,091,250	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	Rp 182,927,500	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	11
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	Rp 50,250,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	Rp 52,500,000	
	Admimistrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100%	Rp 2,405,658,224	Admimistrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100%	Rp 1,541,533,734	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 79,278,734	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 79,278,734	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 92,482,990	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 92,482,900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 178,552,700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 185,375,900	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 51,727,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 51,727,500	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	Rp 1,349,430,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	Rp 630,483,200	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	Rp 13,794,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan	Rp 13,794,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	7 Laporan	Rp 596,272,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	7 Laporan	Rp 444,272,000	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 44,119,500	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 44,119,500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai RKBU	100%	Rp 663,166,310	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai RKBU	100%	Rp 422,836,870	-
	Pengadaan Mebel	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket mebel yang disediakan	103 Unit	Rp 146,480,650	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah paket mebel yang disediakan	103 Unit	Rp 146,480,650	-

RENCANA KERJA TAHUN 2025

NO.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	11
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	45 unit	Rp 516,685,660	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	45 unit	Rp 276,356,220	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 4,351,414,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 4,351,414,600	-
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	Rp 637,181,220	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	Rp 637,181,220	-
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 3,714,233,380	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 3,714,233,380	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%	Rp 613,115,200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%	Rp 610,335,200	-
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	Rp 263,100,000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit	Rp 248,320,000	-
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	Rp 78,820,000	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	Rp 90,820,000	-
	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah mebel yang dipelihara	20 Unit	Rp 50,000,000	<i>Pemeliharaan Mebel</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah mebel yang dipelihara	20 Unit	Rp 50,000,000	
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	Rp 121,195,200	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	Rp 121,195,200	
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Rp 100,000,000	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	Rp 100,000,000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase Informasi yang terpublikasikan	100%	Rp 13,154,535,200	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase Informasi yang terpublikasikan	100%	Rp 11,020,222,200	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	188 Media	Rp 13,154,535,200	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	188 Media	Rp 11,020,222,200	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	11
	Relasi Media	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan	Rp 11,678,224,250	Relasi Media	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan	Rp 9,778,224,250	
	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	Rp 76,620,000	Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	Rp 65,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi komunikasi publik	100%	Rp 38,952,000	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi komunikasi publik	100%	Rp 38,860,000	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	Rp 55,299,500	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	Rp 47,299,500	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis	1 Media	Rp 744,148,000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis	1 Media	Rp 640,500,000	
	Penyusunan Konten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah konten informasi publik	100 Konten	Rp 287,058,000	Penyusunan Konten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah konten informasi publik	100 Konten	Rp 176,220,000	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	Rp 274,233,450	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	Rp 274,118,450	
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83%	Rp 30,270,742,908	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83%	Rp 28,795,475,359	-
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	Rp 30,270,742,908	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100%	Rp 28,795,475,359	-
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 Aplikasi	Rp 996,400,000	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 Aplikasi	Rp 610,800,000	

RENCANA KERJA TAHUN 2025

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	11
	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE diLingkungan Pemda</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemda	1 Laporan	Rp 104,304,000	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE diLingkungan Pemda</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemda	1 Laporan	Rp 104,120,000	
	<i>Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	Rp 586,630,370	<i>Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	Rp 357,760,071	-
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	1 Dokumen	Rp 230,356,000	<i>Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	1 Dokumen	Rp 230,107,200	
	<i>Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	Rp 897,840,000	<i>Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	Rp 781,840,000	
	<i>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	5 Aplikasi	Rp 48,609,000	<i>Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	5 Aplikasi	Rp 4,195,000	
	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	50 Unit	Rp 177,734,000	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	50 Unit	Rp 177,320,000	-
	<i>Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	50 Perangkat Daerah	Rp 918,500,000	<i>Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	50 Perangkat Daerah	Rp 724,500,000	
	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp 77,210,000	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	Rp 8,390,000	
	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen koordinasi fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	Rp 166,057,950	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah dokumen koordinasi fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	Rp 12,608,000	
	<i>Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	50 Perangkat Daerah	Rp 26,067,101,588	<i>Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	50 Perangkat Daerah	Rp 25,783,835,088	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase terpenuhinya data statistik sektoral	100%	Rp 264,842,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase terpenuhinya data statistik sektoral	100%	Rp 239,033,750	-

RENCANA KERJA TAHUN 2025

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	11
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	100%	Rp 264,842,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	100%	Rp 239,033,750	-
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	75 Orang	Rp 16,970,625	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	75 Orang	Rp 16,970,625	-
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	100%	Rp 133,398,875	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	100%	Rp 107,705,625	
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	Rp 17,959,000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	Rp 17,959,000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	Rp 17,559,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	Rp 17,559,000	
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik	1 Dokumen	Rp 78,954,500	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik	1 Dokumen	Rp 78,839,500	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Indeks keamanan informasi	66 Indeks	Rp 770,634,600	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Indeks keamanan informasi	66 Indeks	Rp 650,472,400	-
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	90%	Rp 414,680,600	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	90%	Rp 294,518,400	-
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	Rp 80,729,000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	1 Dokumen	Rp 59,592,000	-

RENCANA KERJA TAHUN 2025

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	11
	<i>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	1 Laporan	Rp 283,041,600	<i>Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	1 Laporan	Rp 185,554,400	
	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	Rp 11,078,000	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	Rp 10,940,000	
	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	50 Perangkat Daerah	Rp 39,832,000	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	50 Perangkat Daerah	Rp 38,432,000	
	<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah OPD yang menggunakan perangkat komunikasi sandi	27 Perangkat Daerah	Rp 355,954,000	<i>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah OPD yang menggunakan perangkat komunikasi sandi	27 Perangkat Daerah	Rp 355,954,000	
	<i>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	27 Perangkat Daerah	Rp 355,954,000	<i>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	27 Perangkat Daerah	Rp 355,954,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Melalui kegiatan musrenbang, baik itu dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD maupun Musrenbang Kota, Perangkat Daerah akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Usulan masyarakat sebagian besar umumnya mengajukan usulan mengenai perbaikan sarana prasarana jalan, tetapi ada juga sebagian yang mengusulkan kegiatan pada OPD teknis yang pada garis besarnya meminta bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan tupoksi Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kota Medan, untuk tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tidak ada usulan-usulan baik dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD maupun dari Musrenbang Kota. Adapun usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	NIHIL	-	-	-	-

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, diperlukan arah pembangunan yang jelas di bidang komunikasi dan informatika, Peran pemerintah sangat diharapkan dalam upaya terbentuknya masyarakat Indonesia yang informatif. Dengan arah kebijakan yang tepat, sangat besar harapannya dibidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat berpengetahuan tersebut.

Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima (terakhir) masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Medan dalam mencapai visi jangka menengah 2021 -2026 yaitu : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF “

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Kota Medan 2021–2026 Penjabaran arah prioritas pembangunan tersebut diurai melalui program prioritas berikut :

1. Perbaikan Infrastruktur
2. Kesehatan
3. Kebersihan
4. Banjir
5. Kawasan Haritage
6. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Secara khusus untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan kontribusi melalui penyediaan infrastruktur bidang Komunikasi, informatika, Statistik, dan Persandian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Pemerintah Kota tahun 2025, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam rangka memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari setiap misi ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo dan Komunikasi Tahun 2025.

Visi pembangunan kota 2021 - 2026, dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan kota yang ditetapkan. Misi pembangunan kota ini, diyakini mampu menjadi langkah efektif, mewujudkan Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif.

Misi yang akan menjadi acuan arah pembangunan kota adalah :

1. **MEDAN BERKAH**, Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. **MEDAN MAJU**, Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.
3. **MEDAN MEMBANGUN**, Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.
4. **MEDAN KONDUSIF**, Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat
5. **MEDAN INOVATIF**, Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya
6. **MEDAN BERSIH**, Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
7. **MEDAN BERIDENTITAS**, Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Dalam mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, tujuan dan sasaran renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2025 mengacu pada misi yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian yaitu Misi Medan Bersih “Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel”

Tujuan dan sasaran urusan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Medan Tahun 2025, yang sesuai dengan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik atau Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.	Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Data Daerah	Indeks Transformasi Data Digital
3.	Peningkatan Layanan Publik dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan rumusan program dan kegiatan di dinas ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan yaitu :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota Medan sesuai RPJMD 2021-2026 yang menetapkan sasaran strategis pemerintah daerah yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- b. Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sesuai Renstra Dinas 2021-2026 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik.
- c. Peraturan Walikota yang mendukung pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang menentukan kebijakan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

- d. Peraturan/Arahan/Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
- e. Masukan dari Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang ada di Pemerintahan Kota Medan ataupun masyarakat yang mengakibatkan adanya penambahan kegiatan/sub kegiatan di dinas yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 merupakan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2025, berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dimana terdiri dari 5 Program yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, (3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, (4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, dan (5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berfokus pada kegiatan-kegiatan rutin penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, dan evaluasi kinerja, kegiatan administrasi keuangan, kegiatan administrasi umum, kegiatan pengadaan barang, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, berfokus pada kegiatan pengelolaan media komunikasi publik, kegiatan pelayanan informasi publik dan kegiatan layanan hubungan media. Program ini diarahkan untuk meningkatkan sosialisasi

kegiatan pemerintah kota kepada masyarakat melalui media media yang bekerjasama dengan pemerintah kota Medan.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika berfokus kepada kegiatan pengelolaan pusat data, kegiatan penyelenggaraan sistem intra pemerintah daerah serta kegiatan pengembangan aplikasi. Pada program ini diarahkan untuk dapat meningkatkan penggunaan aplikasi secara online dan terintegrasi pada pemerintah daerah dan masyarakat.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, berfokus pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral. Program ini diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan data statistik daerah yang terkelola dengan baik dan terintegrasi melalui Satu Data Indonesia khususnya dalam Medan Satu Data yang menjadi target dari misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi difokuskan kepada kegiatan penyediaan layanan keamanan pemerintah daerah. Program ini diharapkan dapat mewujudkan layanan informasi yang terlindungi dan terjaga dengan baik. Untuk Tahun 2025 Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adapun sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik ;
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika ;
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral ;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi ;
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun rincian program/kegiatan/sub kegiatan dan penggunaan anggaran yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informasi pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Medan

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
2	URUSAN PEMERINTAHAN AJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%	22,951,977,098			18,751,286,976
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				127,607,000			31,169,372
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Kominfo Kota Medan	3 Dokumen	127,607,000	APBD		31,169,372
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15,662,822,194			10,648,755,709
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Kominfo Kota Medan	60 Org/bln	15,662,822,194	APBD		10,648,755,709
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				235,427,500			172,714,275
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Kominfo Kota Medan	2 Paket	182,927,500	APBD		122,213,025
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kominfo Kota Medan	3 Orang	52,500,000	APBD		50,501,250
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,541,533,734			2,077,950,845
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Paket	79,278,734	APBD		81,612,784
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Paket	92,482,900	APBD		75,618,238
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kanto yang disediakan	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Paket	185,375,900	APBD		187,288,376
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Paket	51,727,500	APBD		19,585,920

RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dinas Kominfo Kota Medan	4 Dokumen	630,483,200	APBD		1,372,089,585
2.16.01.2.06.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Laporan	13,794,000	APBD		10,405,020
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Kominfo Kota Medan	7 Laporan	444,272,000	APBD		311,407,967
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Dokumen	44,119,500	APBD		19,942,955
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				422,836,870			689,637,225
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Dinas Kominfo Kota Medan	103 Unit	146,480,650	APBD		257,487,225
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Dinas Kominfo Kota Medan	45 Unit	276,356,220	APBD		432,150,000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4,351,414,600			4,361,051,431
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Kominfo Kota Medan	3 Laporan	637,181,220	APBD		643,568,960
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Laporan	3,714,233,380	APBD		3,717,482,471
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				610,335,200			770,008,119
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Dinas Kominfo Kota Medan	7 Unit	248,320,000	APBD		360,423,150
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Kominfo Kota Medan	2 Unit	90,820,000	APBD		145,000,000
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Dinas Kominfo Kota Medan	20 Unit	50,000,000	APBD		50,250,000
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Kominfo Kota Medan	15 Unit	121,195,200	APBD		114,334,969

RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Unit	100,000,000	APBD		100,000,000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			100%	11,020,222,200			16,607,652,743
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				11,020,222,200			16,607,652,743
2.16.02.2.01.14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	Dinas Kominfo Kota Medan	3 Laporan	9,778,224,250	APBD		13,938,008,838
2.16.02.2.01.17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Dinas Kominfo Kota Medan	50 Permohonan	65,000,000	APBD		140,467,770
2.16.02.2.01.18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi komunikasi publik	Dinas Kominfo Kota Medan	100%	38,860,000	APBD		170,850,000
2.16.02.2.01.19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Rekomendasi	47,299,500	APBD		324,000,000
2.16.02.2.01.21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Media	640,500,000	APBD		810,997,555
2.16.02.2.01.23	Penyusunan Konten	Jumlah konten informasi publik	Dinas Kominfo Kota Medan	100 Konten	176,220,000	APBD		409,477,200
2.16.02.2.01.24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Dinas Kominfo Kota Medan	100 Orang	274,118,450	APBD		813,851,380
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			100%	28,795,475,359			37,111,175,469
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				28,795,475,359			37,111,175,469
2.16.03.2.02.13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Dinas Kominfo Kota Medan	10 Aplikasi	610,800,000	APBD		1,889,802,000
2.16.03.2.02.15	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE diLingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemda	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Laporan	104,120,000	APBD		165,000,000

RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.16.03.2.02.16	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Dokumen	357,760,071	APBD		950,700,000
2.16.03.2.02.19	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Dokumen	230,107,200	APBD		258,162,390
2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Dinas Kominfo Kota Medan	2 Aplikasi	781,840,000	APBD		799,960,000
2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Dinas Kominfo Kota Medan	5 Aplikasi	4,195,000	APBD		77,527,600
2.16.03.2.02.23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Dinas Kominfo Kota Medan	50 Unit	177,320,000	APBD		261,213,947
2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Kominfo Kota Medan	50 Perangkat Daerah	724,500,000	APBD		1,052,500,000
2.16.03.2.02.26	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Dokumen	8,390,000	APBD		100,500,000
2.16.03.2.02.28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Dinas Kominfo Kota Medan	2 Dokumen	12,608,000	APBD		245,708,300
2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Dinas Kominfo Kota Medan	50 Perangkat Daerah	25,783,835,088	APBD		31,310,101,232
2.20	BIDANG STATISTIK							
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
				100%	239,033,750			718,800,548
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				239,033,750			718,800,548
2.20.02.2.01.07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Dinas Kominfo Kota Medan	75 Orang	16,970,625	APBD		91,500,000
2.20.02.2.01.08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan	Dinas Kominfo Kota Medan	100%	107,705,625	APBD		179,266,253

RENCANA KERJA TAHUN 2025

2.20.02.2.01.09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Dinas Kominfo Kota Medan	100%	17,959,000	APBD		120,779,840
2.20.02.2.01.10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Dokumen	17,559,000	APBD		137,254,455
2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Dokumen	78,839,500	APBD		190,000,000
2.11	BIDANG PERSANDIAN							
2.11.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			100%	650,472,400			1,234,992,380
2.11.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				294,518,400			871,883,705
2.11.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Dokumen	59,592,000	APBD		275,738,131
2.11.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Laporan	185,554,400	APBD		435,250,000
2.11.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dinas Kominfo Kota Medan	1 Laporan	10,940,000	APBD		7,895,574
2.11.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Dinas Kominfo Kota Medan	50 Perangkat Daerah	38,432,000	APBD		153,000,000
2.11.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				355,954,000			363,108,675
2.11.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Dinas Kominfo Kota Medan	27 Perangkat Daerah	355,954,000	APBD		363,108,675
TOTAL :					63,657,180,807			74,423,908,116

BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Bab ini menyajikan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi dasar pemberian layanan di dinas. Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang telah direncanakan Tahun 2025 terdiri dari 5 program, 11 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut ini.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 3. Pemeliharaan Mebel. 4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan : 1. Relasi Media. 2. Pelayanan Informasi Publik. 3. Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. 4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik. 5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik. 6. Penyusunan Konten. 7. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional. 2. Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda. 3. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah. 4. Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE. 5. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. 6. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. 7. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas. 8. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota. 9. Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo. 10. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE. 11. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE

4.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral. 2. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional. 3. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral. 4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. 5. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan : 1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam dokumen rancangan akhir Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025, yang disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja						Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp.)	Unit Penanggung Jawab	Sumber Dana		
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
							Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur		Target				Tolok Ukur	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										63,657,180,807		
2	16				BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										62,767,674,657		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										22,951,977,098		
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										127,607,000		
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100%	127,607,000	Sekretariat	APBD		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										15,662,822,194		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	100 %	15,662,822,194	Sekretariat	APBD		
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										235,427,500		
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	100 %	182,927,500	Sekretariat	APBD		
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	100 %	52,500,000	Sekretariat	APBD		
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,541,533,734		
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	79,278,734	Sekretariat	APBD		
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	92,482,900	Sekretariat	APBD		
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	185,375,900	Sekretariat	APBD		

RENCANA KERJA TAHUN 2025

2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	51,727,500	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	630,483,200		APBD
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	13,794,000	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	444,272,000	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	44,119,500	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								422,836,870		
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah paket mebel yang disediakan	103 unit	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai RKBU	100%	146,480,650	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 unit	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai RKBU	100%	276,356,220	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4,351,414,600		
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	637,181,220	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,714,233,380	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								610,335,200		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 unit	Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%	248,320,000	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%	90,820,000	Sekretariat	APBD

RENCANA KERJA TAHUN 2025

2	16	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%	50,000,000	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%	121,195,200	Sekretariat	APBD
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Medan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100%	100,000,000	Sekretariat	APBD
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							11,020,222,200			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							11,020,222,200			
2	16	02	2.01	14	Relasi Media	Kota Medan	Persentase Informasi yang terpublikasikan	100 %	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi dewan pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	188 Media	9,778,224,250	Bidang Komunikasi Publik	APBD
2	16	02	2.01	17	Pelayanan Informasi Publik	Kota Medan	Persentase Informasi yang terpublikasikan	100 %	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	50 Permohonan	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	188 Media	65,000,000	Bidang Komunikasi Publik	APBD
2	16	02	2.01	18	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Medan	Persentase Informasi yang terpublikasikan	100 %	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi komunikasi publik	100%	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	188 Media	38,860,000	Bidang Statistik dan Informasi Publik	APBD
2	16	02	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kota Medan	Persentase Informasi yang terpublikasikan	100 %	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	188 Media	47,299,500	Bidang Komunikasi Publik	APBD
2	16	02	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Medan	Persentase Informasi yang terpublikasikan	100 %	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	188 Media	640,500,000	Bidang Komunikasi Publik	APBD

RENCANA KERJA TAHUN 2025

2	16	02	2.01	23	Penyusunan Konten	Kota Medan	Persentase Informasi yang terpublikasikan	100 %	Jumlah konten informasi publik	100 Konten	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	188 Media	176,220,000	Bidang Statistik dan Informasi Publik	APBD
2	16	02	2.01	24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kota Medan	Persentase Informasi yang terpublikasikan	100 %	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	Jumlah media massa, media pemerintah, media sosial, komunitas informasi dan komunikasi publik yang mengelola informasi dan kebijakan pemerintah kota	188 Media	274,118,450	Bidang Komunikasi Publik	APBD
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								28,795,475,359		
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								28,795,475,359		
2	16	03	2.02	13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah aplikasi SPBE pemerintah daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 Aplikasi	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	610,800,000	Bidang Aplikasi Informatika	APBD
2	16	03	2.02	15	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE diLingkungan Pemda	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan pemda	1 Laporan	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	104,120,000	Bidang Aplikasi Informatika	APBD
2	16	03	2.02	16	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	357,760,071	Bidang Teknologi Informatika	APBD
2	16	03	2.02	19	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	1 Dokumen	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	230,107,200	Bidang Teknologi Informatika	APBD

RENCANA KERJA TAHUN 2025

2	16	03	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	781,840,000	Bidang Teknologi Informatika	APBD
2	16	03	2.02	21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	5 Aplikasi	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	4,195,000	Bidang Aplikasi Informatika	APBD
2	16	03	2.02	23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	50 Unit	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	177,320,000	Bidang Aplikasi Informatika	APBD
2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	50 Perangkat Daerah	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	724,500,000	Bidang Aplikasi Informatika	APBD
2	16	03	2.02	26	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	8,390,000	Bidang Aplikasi Informatika	APBD
2	16	03	2.02	28	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah dokumen koordinasi fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Dokumen	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	12,608,000	Bidang Aplikasi Informatika	APBD
2	16	03	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Kota Medan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	83 %	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	50 Perangkat Daerah	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100 %	25,783,835,088	Bidang Aplikasi Informatika	APBD

RENCANA KERJA TAHUN 2025

2	20				BIDANG STATISTIK							239,033,750			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							239,033,750			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							239,033,750			
2	20	02	2.01	07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Medan	Persentase terpenuhinya data statistik sektoral	100 %	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	75 Orang	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	100 %	16,970,625	Bidang Statistik dan Informasi Publik	APBD
2	20	02	2.01	08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Kota Medan	Persentase terpenuhinya data statistik sektoral	100 %	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi	100%	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	100 %	107,705,625	Bidang Statistik dan Informasi Publik	APBD
2	20	02	2.01	09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kota Medan	Persentase terpenuhinya data statistik sektoral	100 %	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	100 %	17,959,000	Bidang Statistik dan Informasi Publik	APBD
2	20	02	2.01	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Medan	Persentase terpenuhinya data statistik sektoral	100 %	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	100 %	17,559,000	Bidang Statistik dan Informasi Publik	APBD
2	20	02	2.01	11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kota Medan	Persentase terpenuhinya data statistik sektoral	100 %	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik	1 Dokumen	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia	100 %	78,839,500	Bidang Statistik dan Informasi Publik	APBD
2	21				BIDANG PERSANDIAN							650,472,400			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							650,472,400			
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							294,518,400			
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	Indeks keamanan informasi	66 Indeks	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	90 %	59,592,000	Bidang Persandian	APBD
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	Indeks keamanan informasi	66 Indeks	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	90 %	185,554,400	Bidang Persandian	APBD
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Medan	Indeks keamanan informasi	66 Indeks	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	90 %	10,940,000	Bidang Persandian	APBD
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	Indeks keamanan informasi	66 Indeks	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	56 Perangkat daerah	Cakupan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah kota yang terselenggara dengan baik	90 %	38,432,000	Bidang Persandian	APBD
	2	21	02	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							355,954,000			
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	Indeks keamanan informasi	66 Indeks	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27 Perangkat daerah	Jumlah OPD yang menggunakan perangkat komunikasi sandi	27 Jumlah OPD	355,954,000	Bidang Persandian	APBD
Total :													63,657,180,807		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan selama Tahun Anggaran 2023, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Catatan penting yang menjadi perhatian untuk pelaksanaan selanjutnya adalah :

- a. Perlunya peningkatan/penambahan penyediaan aplikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Perlunya penambahan penyediaan kapasitas bandwidth internet Pemerintah Kota Medan.
- c. Perlunya peningkatan kemampuan pengumpulan dan pengelolaan penyediaan data statistik sektoral melalui pelatihan dan sosialisasi dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data Pemerintah Kota Medan.
- d. Perlunya membentuk CSIRT (Cyber Security Incident Response Team) dalam pengelolaan tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah.
- e. Dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai peningkatan nilai SAKIP maka diperlukan tata kelola administrasi dan dokumentasi yang baik mulai tahapan perencanaanm pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di dinas.

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan yang ditetapkan ditunjukkan melalui pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah dan sasaran strategis dinas yang mana dilakukan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unsur Pemerintah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan atau mendukung program-program dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tetap konsisten menggunakan RPJMD 2021 – 2026 dalam menyusun dokumen perencanaan di dinas.
3. Adanya pemantauan dan evaluasi yang teratur dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan baik dari dinas maupun pemerintah daerah.

Untuk selanjutnya, agar pelaksanaan perencanaan dapat lebih baik dilakukan, beberapa langkah tindak lanjut yang akan dilakukan di dinas antara lain sebagai berikut :

- Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi pelaksanaan program/kegiatan dapat dicapai sesuai dengan harapan.
- Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antar program dan pagu anggaran yang tersedia.
- Adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
- Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan secara teratur per tri wulan dalam setiap tahun anggaran.
- Adanya pengambilan kebijakan/tindakan terhadap permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan di dinas.

Renja yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan Renja ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo tahun 2025.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance).

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2025 ini diharapkan dalam pencapaian sasaran strategis OPD, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.